

BAB I

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

The evolution and influence of norms (Siklus Norma) yang berisi proposisi/ tahap terkait persebaran norma kesetaraan gender yang termaktub dalam Resolusi DK PBB No. 1325 kepada negara Somalia oleh UNSOM sebagai aktor sosialisasi. Sehingga dapat diketahui progresivitas agenda partisipasi perempuan di Somalia dan sejauh mana UNSOM mempromosikan sebuah norma internasional. Serta, bagaimana proses implementasi dari *Women, peace and Security*.

Women, Peace and Security (WPS) dalam Resolusi DK PBB No.1325 merupakan salah satu bagian integral dari mandat *United Nations Assistance Mission of Somalia* (UNSOM). Melalui kewajibannya terhadap *Women, peace and Security*, UNSOM memastikan bahwa isu-isu gender dan WPS ditangani serta diterapkan oleh seluruh entitas yang ada di Somalia. Hal ini termasuk dalam upaya advokasi terhadap resolusi DK PBB No 1325, upaya memajukan partisipasi perempuan dalam proses pencegahan konflik, proses pembangunan perdamaian dan pembangunan negara, serta mewujudkan partisipasi di bidang politik dan keamanan pertahanan.

Pada tahap kedua Siklus Norma '*norm cascade*' upaya sosialisasi terhadap Resolusi DK PBB No. 1325 oleh UNSOM ditandai dengan legitimasi terhadap resolusi tersebut secara nasional oleh aktor domestik

yakni dengan diluncurkannya RAN (Rencana Aksi Nasional) sebagai wujud komitmen pemerintah Somalia atas implementasi *Women, peace and Security*. Kendati demikian, agenda partisipasi perempuan yang seharusnya berjalan dengan baik pasca diluncurkannya RAN ternyata masih belum mendapat jumlah yang signifikan.

Tahap terakhir siklus norma '*norm internalizations*', proses internalisasi norma global kesetaraan gender di tingkat domestik melibatkan proses yang kompleks. Jumlah yang signifikan telah dicapai oleh Somalia untuk mewujudkan agenda partisipasi perempuan didalam peran pencegahan konflik. Dimana dengan sekitar 20 petugas wanita Somalia tergabung dalam *Somali National Army* dan *Somali Police Force*. Serta, kemajuan dalam bidang keamanan dan pertahanan dengan terbentuknya pasukan polisi khusus yang bernama 'Haramcad' dan telah merekrut sebanyak 50 wanita. Namun, dalam bidang politik nampaknya keterwakilan perempuan dalam Parlemen Federal Somalia mengalami penurunan dari jumlah kursi yang telah direncanakan. Pada proses pemilihan anggota parlemen telah diberikan sebuah kuota sebesar 82 keterwakilan perempuan. Namun pada periode tahun 2021/2022, telah menurun dengan jumlah 57 dari tahun periode pemilihan sebelumnya di tahun 2016/2017 yaitu sebesar 67. Sehingga peran perempuan dalam bidang politik nampaknya masih perlu ditingkatkan.

Tantangan utama bukanlah karena kurangnya undang-undang atau kinerja UNSOM. Namun, dipengaruhi oleh lemahnya implementasi secara domestik yang disebabkan beberapa hal. Konsep relativisme budaya ‘kuat’ memberikan gambaran di dalam lingkup domestik, realitas lokal atau kondisi masyarakat yang patriarkal dan konservatif membentuk pengaruh serta menjadikannya tantangan pada proses internalisasi norma kesetaraan gender yang membuat sejumlah segregasi gender sehingga menjadi tantangan perempuan Somalia untuk memperoleh adanya partisipasi publik.

1.2 Saran

Penelitian ini hanya didasarkan pada data-data sekunder yang diperoleh melalui buku dan berbagai media online atau riset pustaka tanpa melakukan observasi langsung ke lapangan. Sehingga, tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai fakta dan fenomena yang belum diungkap oleh media. Saran yang diberikan pada penelitian selanjutnya, diharapkan untuk menyajikan dan mengolah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Oleh karena itu, akan jauh lebih baik apabila mencantumkan hasil wawancara dengan salah satu pihak yang terkait. Salah satunya yaitu dengan *Human Rights and Protection Group (HRGPG)* atau kelompok Hak Asasi Manusia dan Perlindungan UNSOM dimana tugas mereka yang mencakup perlindungan dan pemajuan hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional, termasuk perlindungan terhadap warga sipil. Penggunaan data primer ini sangat penting untuk membantu peneliti

mengetahui banyak hal secara mendalam. Terlebih mengenai upaya pemberdayaan perempuan, beserta proses perlindungan dan tinjauan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan.

Terkait permasalahan agenda partisipasi perempuan Somalia sendiri, peneliti memiliki saran kepada beberapa pihak:

1. Diperlukan upaya UNSOM untuk memperdalam kerjasama dan kolaborasi bersama masyarakat sipil untuk memperkenalkan pentingnya partisipasi perempuan yang setara dan bermakna pada semua tingkat pengambilan keputusan. Diperlukan pula upaya operasi penjagaan yang ketat di setiap sudut Somalia dengan bekerjasama dengan sejumlah aktor yang relevan dengan membentuk rencana untuk melindungi warga sipil pada kasus kekerasan terutama kekerasan seksual. UNSOM dihimbau untuk mempromosikan upaya tata kelola dan perluasan bantuan serta layanan terutama pada daerah daerah yang masih pada kondisi yang rapuh. Membangun strategi kepekaan publik yang dapat meningkatkan pemahaman pembuat kebijakan tentang peran dan kebutuhan laki-laki dan perempuan untuk memperkuat dan mengubah tingkat kesetaraan gender di antara masyarakat Somalia (Horst, 2017).

1. Pada tingkat domestik pemerintah Federal Somalia perlu melakukan upaya yang optimal untuk menyelaraskan semua peran dan tanggung jawab terhadap agenda kesetaraan gender dalam

kebijakan gender nasional yang menargetkan pemberdayaan perempuan melalui rencana pembangunan nasional dan agenda politik. Pemerintah juga perlu memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia yang ditawarkan oleh komunitas internasional untuk membentuk strategi dalam mengatasi kendala yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam publik, serta memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivisme dan gerakan sosial.